

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DI KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Disusun Oleh:

NAMA : KAISAR JULIZAR
NPM : 2241021049
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
2026**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	:	Kaisar Julizar
NPM	:	2241021049
Jurusan	:	Administrasi Publik
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	:	Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia)	:	Strategi Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
Judul Tesis (Bahasa Inggris)	:	<i>Implementation Strategy for the Out-of-School Children (OSC) Policy in Rumpin District, Bogor Regency</i>

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.)

Pembimbing II



(Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A.)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Kaisar Julizar
NPM : 2241021049
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi Implementasi Kebijakan Penanganan Anak
Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Rumpin
Kabupaten Bogor

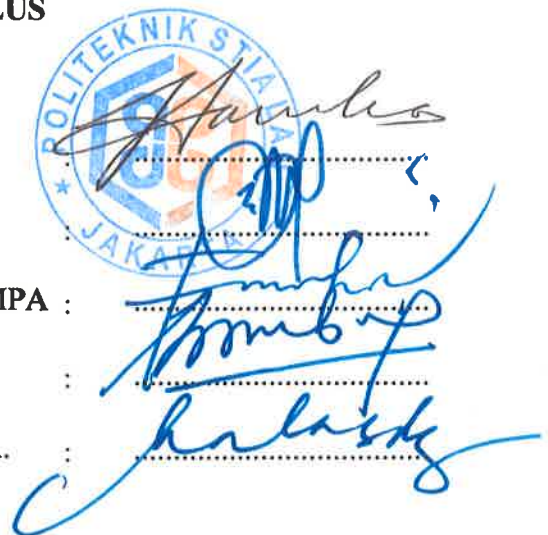
Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Juni 2026
Pukul : 13.30 s.d. selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Hamka, M.A.
Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si.
Anggota : Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA :
Pembimbing 1 : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd. :
Pembimbing 2 : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. :



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaisar Julizar
NPM : 2241021049
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang telah saya buat ini dengan judul “Strategi Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 2 Juni 2026



Kaisar Julizar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul "Strategi Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor." Penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta dorongan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penulis dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd. Sebagai pembimbing utama, Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd. telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam setiap tahap penelitian. Ilmu, arahan, dan keteladanan beliau menjadi pilar utama kesuksesan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A., selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan wawasan yang mendalam dan kritik-kritik konstruktif, yang telah melengkapi dan memperkaya isi tesis ini.
3. Pimpinan dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Risetm dan Inovasi Daerah. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh staf atas izin dan dukungan yang luar biasa. Kerjasama yang baik dan fasilitas yang diberikan telah membantu kelancaran penelitian ini.
4. Pihak Kecamatan Rumpin, khususnya Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang telah memfasilitasi peneliti dalam mendukung kelancaran penelitian ini.
5. Kepala sekolah dan orang tua ATS yang juga memberikan dukungan luar biasa demi kelancaran penelitian ini.
6. Rekan Sekelas Terima kasih kepada rekan sekelas yang selalu memberikan dukungan, berbagi ide, dan pengalaman selama perjalanan penulisan tesis ini. Semua interaksi dan kolaborasi kami menjadi bagian berharga dalam pengembangan ide dan pemahaman.
7. Istri Tercinta dan anak-anak: Cahya dan Sagara, peneliti ucapkan terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan cinta yang luar biasa. Semangat dan dukungannya memberikan inspirasi dan kekuatan tambahan dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kedua orang tua juga peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas doa dan dukungan yang diberikan selama peneliti menjalankan studi.
9. Tim Penguji Sidang Tugas Akhir Penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penguji sidang tugas akhir yang telah memberikan masukan berharga dan kesempatan untuk berdiskusi. Kontribusi masing-masing anggota tim penguji menjadi landasan penting dalam peningkatan kualitas tesis ini.
10. Para Dosen Terima kasih kepada para dosen yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmu, panduan, dan dukungan selama proses akademik. Setiap pembelajaran dan diskusi telah membentuk pemahaman yang mendalam.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata, terutama dalam pengembangan kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah di Kecamatan Rumpin dan Kabupaten Bogor pada umumnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih.

Jakarta, 2 Juni 2026
Peneliti

Kaisar Julizar



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Strategi Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Kaisar Julizar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan penanganan ATS di Rumpin serta merumuskan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci dan telaah dokumen, lalu dianalisis secara induktif-deduktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi guna menghasilkan temuan yang sistematis dan valid. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*; belum optimalnya implementasi kebijakan ATS di Kecamatan Rumpin bukanlah akibat dari satu faktor tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara karakteristik masalah yang sulit dikendalikan, kelemahan dalam desain kebijakan, serta lingkungan eksternal yang tidak mendukung. *Kedua*, strategi implementasi kebijakan penanganan ATS di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yaitu meliputi; melakukan reposisi titik implementasi kebijakan, harus menyentuh struktur layanan pendidikan itu sendiri yang selama ini cenderung kaku dan tidak adaptif, harus diarahkan pada penguatan aktor lapangan, dan berani menyentuh akar struktural dari permasalahan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi lokal.

Kata kunci: Strategi, Implementasi Kebijakan, Anak Tidak Sekolah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor

ABSTRACT

Implementation Strategy for Out-of-School Children (OSC) Policy in Rumpin District, Bogor Regency

Kaisar Julizar

This study aims to analyze the causes of the suboptimal implementation of the policy for handling Out-of-School Children (OSC) in Rumpin and to formulate more effective and targeted implementation strategies. This study uses a qualitative method with a case study to analyze the implementation of the policy for handling out-of-school children (OSC) in Rumpin District, Bogor Regency. Data were obtained through semi-structured interviews with key informants and document review, then analyzed inductively-deductively using the Miles, Huberman, and Saldana model through the stages of reduction, presentation, and verification to produce systematic and valid findings. The results of the study indicate, first; the suboptimal implementation of the OSC policy in Rumpin District is not the result of a single factor, but rather the result of a complex interaction between the characteristics of the problem that are difficult to control, weaknesses in policy design, and an unsupportive external environment. Second, the strategy for implementing the OSC in Rumpin District, Bogor Regency, includes; repositioning the focal point of policy implementation, must touch the structure of the education service itself which has tended to be rigid and non-adaptive, must be directed at strengthening field actors, and dare to touch the structural roots of the problem, especially those related to the local economy.

Keywords: *Strategy, Policy Implementation, Out-of-School Children, Rumpin District, Bogor Regency*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Rumusan Permasalahan	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Kebijakan	28
C. Tinjauan Teoritis	36
D. Kerangka Berpikir	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	62
A. Metode Penelitian	62
B. Teknik Pengumpulan Data	63
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	67
A. Gambaran Umum Penelitian	67
B. Analisis dan Pembahasan	71

BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ATS di Indonesia	2
Tabel 1.2 Lima Provinsi dengan Jumlah ATS dan Penduduk Terbanyak	3
Tabel 1.3 Daerah dengan ATS Terbanyak di Jawa Barat (Jiwa)	4
Tabel 1.4 Jumlah ATS Berdasarkan Faktor Penyebabnya di Kab. Bogor	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Daftar Informan Kunci	64
Tabel 4.1 Peran Aktor dalam Penanganan ATS di Kabupaten Bogor	66
Tabel 4.2 Identifikasi Faktor Penyebab ATS di Kecamatan Rumpin	69
Tabel 4.3 Analisis Dimensi <i>Tractability</i> (Tingkat Kesulitan Permasalahan) .	85
Tabel 4.4 Analisis Kemampuan Kebijakan untuk Menstruktur Implementasi (Ability of the Statute to Structure Implementation)	100
Tabel 4.5 Analisis Variabel di Luar Kebijakan (<i>Non-Statutory Variables</i>) .	110
Tabel 4.6 Analisis Implementasi ATS di Rumpin (Perspektif Backward Mapping)	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komparasi HLS Kab. Bogor, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2024	7
Gambar 1.2 Komparasi RLS Kab. Bogor, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2024	8
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edward III	45
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan van Meter dan van Horn	46
Gambar 2.3 <i>Implementation as A Political and Administrative Process (Grindle)</i>	47
Gambar 2.4 Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier	48
Gambar 2.5 Teori Strategi Backward Mapping Richard Elmore	59
Gambar 2.6 Kerangka Berpikir	61
Gambar 3.1 Model Analisis Data Kualitatif	66
Gambar 4.1 Strategi Implementasi Kebijakan dalam Upaya Penanganan ATS di Kecamatan Rumpin	122

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Anak tidak sekolah (ATS) merupakan isu global. Semua negara menghadapi persoalan tersebut. Selama kurun 2021–2023, UNESCO melaporkan telah terjadi peningkatan jumlah ATS di seluruh dunia. Jumlah peningkatan ATS dalam periode tersebut mencapai enam juta anak. Total jumlah ATS di seluruh dunia pada tahun 2023 mencapai tidak kurang dari 250 juta anak usia sekolah. Data UNESCO tersebut sebagian berasal dari tingginya jumlah anak perempuan yang tidak masuk dalam sistem pendidikan seperti di Afghanistan dan sebagian lainnya diperoleh dari stagnasi perkembangan pendidikan di seluruh dunia. Terjadinya perlambatan perkembangan pada sektor pendidikan di seluruh dunia telah dimulai sejak tahun 2015 dan diperparah oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan partisipasi pendidikan, baik pada jalur formal maupun jalur nonformal. Jika tren ini berlanjut, dikhawatirkan akan mengganggu tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goal* (SDG), khususnya pada target SDG ke-4, yaitu pendidikan bermutu untuk semua yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 (UNESCO, 2023).

Persoalan global tersebut turut dialami oleh Indonesia. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, jumlah ATS di Indonesia juga tertinggi di kawasan. Berdasarkan estimasi UNICEF, jumlah ATS di Indonesia mencapai 4,1 juta anak usia sekolah pada tahun 2022 atau 7,6% dari populasi anak usia 7-18 tahun, sebagaimana hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022 (Kemendikbudristek dan UNICEF, 2024). Sampai tahun 2025, jumlah ATS di Indonesia juga masih belum turun dari angka 4 juta. Data ATS yang ditampilkan dalam portal Sistem Manajemen Data ATS yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menunjukkan jumlah ATS masih berada di angka 4,2 juta lebih. Angka tersebut terdiri dari anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah bersekolah (BPB) atau

dengan kata lain tidak pernah tercatat dalam sistem pendidikan sebanyak 2 juta anak lebih, anak yang mengalami putus sekolah/*drop out* (DO), yaitu anak yang tidak menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu yang berjumlah hampir 1,1 juta anak, dan anak yang berhasil menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya atau lulus tidak melanjutkan (LTM) sebanyak 1,1 juta anak lebih.

Tabel 1.1 Jumlah ATS di Indonesia

Kategori ATS	Jumlah
BPB	2.012.100
DO	1.097.550
LTM	1.129.437
Total	4.239.087

Sumber: Data Rekapitulasi ATS Pusdatin Kemendikdasmen
per 17 September 2025

Berdasarkan sebaran wilayah, provinsi dengan jumlah ATS terbanyak adalah Jawa Barat dengan 670 ribu lebih ATS. Posisi kedua adalah Jawa Timur dengan 381 ribu lebih ATS, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 359 ribu lebih ATS, Sumatera Utara dengan 258 ribu lebih ATS, dan Banten dengan 199 ribu lebih ATS. Jika ditelusuri lebih lanjut, lima provinsi dengan jumlah ATS terbanyak tersebut adalah provinsi yang juga menempati posisi teratas dalam jumlah penduduk. Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 50 juta lebih merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 41 juta lebih, Jawa Tengah dengan jumlah penduduknya 37 juta lebih, Sumatera Utara dengan 15 juta lebih penduduknya, dan Banten yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 12 juta lebih (Badan Pusat Statistik, 2024). Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, maka kecenderungan memiliki anak usia sekolah juga besar. Peluang munculnya ATS juga lebih tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menekan jumlah absolut ATS yang juga pada saat bersamaan perlu memastikan ketersediaan akses dan kualitas pendidikan yang merata.

Tabel 1.2 Lima Provinsi dengan Jumlah ATS dan Penduduk Terbanyak

Provinsi	Jumlah ATS	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase ATS terhadap Jumlah Penduduk
Jawa Barat	679.627	50.345,2	1,35%
Jawa Timur	381.914	41.814,5	0,91%
Jawa Tengah	359.329	37.892,3	0,95%
Sumatera Utara	258.078	15.588,5	1,65%
Banten	199.475	12.431,4	1,60%

Sumber: Data ATS Pusdatin Kemendikdasmen per 17 September 2025 dan Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (data diolah)

Secara demografis, data tersebut menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk di suatu daerah berbanding lurus dengan jumlah ATS. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula jumlah ATS di daerah tersebut. Meskipun secara persentase tidak jauh berbeda (0,9% – 1,6%), namun dari perspektif jumlah absolut, angka ATS di Jawa Barat jauh lebih besar dan berbeda signifikan dengan empat provinsi lain. Jumlah ATS tertinggi di Jawa Barat terdapat di Kabupaten Bogor. Jika dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan penduduk terbesar di Jawa Barat yang mencapai 6 juta jiwa atau menyumbang 11% dari total penduduk di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan rekapitulasi data ATS Pusdatin Kemendikdasmen per 17 September 2025, jumlah ATS di Kabupaten Bogor sebanyak 81.684 anak, yang terdiri dari 36.485 anak yang belum pernah bersekolah (BPB), 20.164 anak dengan status berhenti sekolah (DO), dan 25.035 anak yang lulus tanpa melanjutkan (LTM). Secara persentase, jumlah ATS di Kabupaten Bogor menyumbang 12% terhadap keseluruhan ATS di Provinsi Jawa Barat. Terdapat lima daerah di Jawa Barat yang memiliki jumlah ATS cukup besar. Empat daerah yang angkanya di atas 50.000 anak dan satu daerah yang hampir menyentuh angka 50.000 anak.

Tabel 1.3 Daerah dengan ATS Terbanyak di Jawa Barat (Jiwa)

Daerah	BPB	DO	LTM	Total
Kabupaten Bogor	36.485	20.164	25.035	81.684
Kabupaten Bandung	26.787	17.408	24.287	68.481
Kabupaten Sukabumi	22.012	16.376	21.807	60.195
Kabupaten Cianjur	25.211	15.884	11.963	53.058
Kabupaten Garut	20.098	17.351	11.964	49.413

Sumber: Data Rekapitulasi ATS Pusdatin Kemendikdasmen per 17 September 2025

Secara geografis, Kabupaten Bogor merupakan wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Posisinya yang strategis, dekat dengan pusat pemerintahan dan pembangunan nasional, seharusnya dapat dimanfaatkan dengan peningkatan sumber daya manusia, salah satunya peningkatan akses pendidikan yang merata. Namun, kondisi sebaliknya yang terjadi. Sebuah ironi di wilayah yang seharusnya mendapat manfaat karena letaknya yang dekat dengan episentrum kemajuan nasional, tetapi masih terdapat kesenjangan yang besar dalam hal pemenuhan salah satu hak dasar warga negara: akses pendidikan. Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji dengan menemukan akar permasalahan, sehingga dapat dirumuskan strategi penanganan ATS yang tepat di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil verifikasi per 17 September 2025, terungkap bahwa alasan terbesar ATS di Bogor adalah karena bekerja sebanyak 3.910 anak. Terbanyak kedua setelah alasan bekerja adalah karena anak sendiri tidak ingin bersekolah. ATS dengan kategori ini juga cukup besar jumlahnya sebanyak 3.330 anak. Selanjutnya, karena tidak ada biaya, sehingga memilih tidak bersekolah sebanyak 1.330 anak. Terdapat pula ATS yang merasa sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini yang berjumlah 638 anak. Anak-anak yang karena pengaruh lingkungan teman memilih untuk tidak bersekolah juga menjadi alasan mangkirnya

anak usia sekolah dalam sistem pendidikan. Mereka dalam kategori ini berjumlah 529 anak. Pernikahan anak juga merupakan alasan anak di Kabupaten Bogor memilih untuk tidak lagi melanjutkan pendidikannya dengan jumlah 420 anak. Alasan karena jarak rumah dengan sekolah jauh sebanyak 173 anak, terdapat anggapan sekolah tidak penting sebanyak 57 anak, tidak memiliki seragam dan mengalami trauma/kekerasan/perundungan masing-masing satu anak, alasan karena tidak memiliki dokumen administrasi resmi seperti akta kelahiran sebanyak 10 anak, masalah kesehatan/penyandang disabilitas sebanyak 180 anak, serta alasan-alasan lain di luar yang telah disebutkan tersebut sebanyak 1.611 anak (Lihat Tabel 1.4).

Tabel 1.4 Jumlah ATS Berdasarkan Faktor Penyebabnya di Kab. Bogor

No.	Faktor Penyebab	Jumlah ATS
1.	Tidak mau bersekolah	3.330
2.	Tidak ada biaya	1.330
3.	Sekolah jauh dari rumah	173
4.	Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini	638
5.	Menikah/mengurus rumah tangga	420
6.	Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	1
7.	Bekerja	3.910
8.	Pengaruh lingkungan/teman	529
9.	Beranggapan sekolah tidak penting	57
10.	Tidak memiliki seragam sekolah	1
11.	Tidak memiliki akta kelahiran	10
12.	Masalah kesehatan/penyandang disabilitas	180
13.	Lainnya	1.611

Sumber: Data Verifikasi ATS Kab. Bogor per 17 September 2025 (Kemendikdasmen, 2025)

Verifikasi penyebab atau alasan anak memilih untuk tidak bersekolah belum dilakukan kepada semua ATS. Data tersebut baru mewakili sekitar 15 ribu lebih ATS atau sekitar 19% dari total ATS di Kabupaten Bogor. Namun, data tersebut

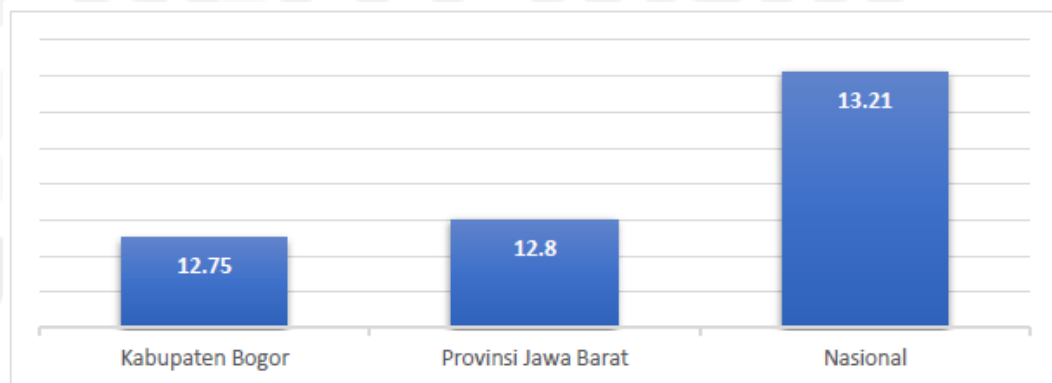
dapat menjadi data awal untuk mendalami akar permasalahan penyebab ATS di “Bumi Tegar Beriman” tersebut. Berdasarkan alasan atau penyebab ATS, anak bekerja menjadi alasan terbesar dengan persentase sebesar 25% dari total ATS yang telah diverifikasi. Alasan bekerja atau mencari uang, pada beberapa daerah di Kabupaten Bogor, telah menjadi pilihan bagi banyak anak. Bahkan, setelah lulus Sekolah Dasar (SD) banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya karena terdapat anggapan di lingkungan tersebut mudah mendapatkan uang. Anggapan tersebut tidak hanya berasal dari anak kalangan keluarga tidak mampu karena memilih membantu orang tua, seperti bertani atau berkebun, tetapi anak dari kalangan keluarga mampu juga memiliki pemikiran serupa.

Fenomena pernikahan dini atau menikah di usia sekolah juga cukup tinggi di Kabupaten Bogor. Desa Sukamulya di Kecamatan Rumpin, misalnya menjadi salah satu contoh desa yang banyak terdapat anak-anak usia sekolah melakukan pernikahan dini. Fenomena ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah ATS di Kabupaten Bogor yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. efek negatif kepada pelakunya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksiapan secara mental dan ekonomi, konflik antarkeluarga yang berujung kepada perceraian (Hanifa, 2024).

Penyebab lainnya adalah karena anak sendiri yang memilih tidak bersekolah atau berhenti bersekolah, tidak memprioritaskan pentingnya pendidikan bagi masa depan, serta pengaruh lingkungan dan pertemanan. Fenomena “Citayam Fashion Week” yang viral beberapa tahun lalu menjadi potret unik sekaligus ironis. Remaja seperti Bonge dan kawan-kawannya melakukan aksi peragaan busana jalanan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, tepat di ruang publik yang bersebelahan dengan Stasiun KRL Sudirman dan Stasiun MRT Dukuh Atas, menjadikannya pusat perhatian nasional. Namun, di balik sorotan kamera dan euforia publik, terdapat ironi besar. Sebagian besar remaja tersebut merupakan anak putus sekolah asal Citayam dan sekitarnya, yang sehari-hari bekerja di jalanan, baik sebagai pengamen, pedagang asongan, maupun buruh. Alih-alih mencerminkan keberhasilan dalam membangun ruang kreatif bagi generasi muda, fenomena ini

justeru menyingkap persoalan serius yang dihadapi Kabupaten Bogor dalam menangani masalah ATS serta keterbatasan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial di daerah penyangga ibu kota tersebut (kumparan.com).

Tingginya angka ATS berpengaruh terhadap tingkat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor. Kondisi IPM Kabupaten Bogor tahun 2024 berada pada nilai 73,63. Meskipun masuk dalam kategori tinggi sesuai dengan klasifikasi BPS (>70), namun nilai IPM Kabupaten Bogor masih berada di bawah IPM Jawa Barat (74,92) dan IPM Nasional (75,02). Salah satu dimensi pembentuk IPM adalah pendidikan, di samping dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi. Pendidikan diukur melalui dua indikator: Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS merupakan harapan lama sekolah yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang, sedangkan RLS adalah gambaran lamanya masa sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Capaian HLS Kabupaten Bogor berada pada nilai 12,75 di bawah capaian HLS Jawa Barat sebesar 12,8 dan target HLS nasional sebesar 13,21 (Lihat Grafik 1.1).

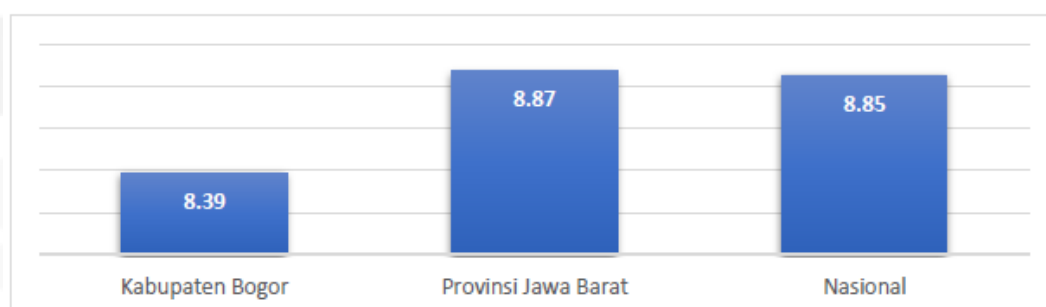


Sumber: BPS (2025)

Gambar 1.1 Komparasi HLS Kab. Bogor, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2024

Capaian HLS Kabupaten Bogor tersebut menggambarkan bahwa anak usia sekolah di wilayah ini memiliki potensi mendapatkan pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Nilai HLS Kabupaten Bekasi masih lebih baik dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah

yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor memiliki nilai HLS sebesar 13,18. Daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor dan memiliki nilai HLS jauh lebih baik dan melewati target nasional adalah Kota Depok dengan nilai HLS sebesar 14,11. Pada sisi lain, terdapat peningkatan capaian RLS Kabupaten Bogor dari 8,37 menjadi 8,39 pada tahun 2024. Meskipun demikian, laju pertumbuhan sebesar 0,02 tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,03. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bogor masih belum mengenyam pendidikan secara penuh. Nilai RLS Kabupaten Bogor ini juga masih rendah dari RLS Jawa Barat yang memiliki capaian 8,87 dan capaian RLS Nasional sebesar 8,85. Nilai RLS Jawa Barat bahkan melampaui RLS nasional sebesar 0,02. Capaian RLS Kabupaten Bogor sebesar 8,39 menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas baru mampu menyelesaikan pendidikan hanya sampai kelas 2 SMP (BPS, 2025).



Sumber: BPS (2025)

Gambar 1.2 Komparasi RLS Kab. Bogor, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2024

Capaian tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Kota Depok dan Kabupaten Bekasi, dua daerah yang berdampingan dengan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bekasi memiliki nilai RLS mencapai 9,76 yang berarti penduduk usia 25 tahun di Kabupaten Bekasi telah mampu menyelesaikan hingga kelas 3 SMP. Sementara itu, Kota Depok jauh lebih baik nilai RLS yang mencapai 11,59 dan merupakan urutan kedua terbaik RLS di Jawa Barat setelah Kota Bekasi dengan nilai RLS 11,79. Padahal secara posisi, daerah-daerah ini adalah daerah penyangga

ibu kota Jakarta yang merupakan pusat pembangunan dan kemajuan nasional. Nilai HLS dan RLS Kabupaten Bogor konsisten berada di bawah capaian HLS dan RLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki tantangan yang besar dan kompleks dalam pembangunan di sektor pendidikan, khususnya dalam penanganan isu ATS.

Berangkat dari persoalan tersebut, penanganan isu ATS di Kabupaten Bogor memerlukan pendekatan komprehensif yang mampu menyentuh akar permasalahan penyebab anak tidak bersekolah atau putus sekolah. Karakteristik persoalan ATS di Kabupaten Bogor tergolong kompleks dan bersifat multidimensional. ATS tidak hanya muncul karena faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial-budaya, dan kelembagaan. Ada anak yang tidak bersekolah karena kemiskinan, ada yang disebabkan oleh jarak sekolah yang jauh, pernikahan dini, atau kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan. Kompleksitas ini menyebabkan kebijakan penanganan ATS memerlukan strategi yang lebih adaptif dan lintas sektor, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, kolaboratif, dan berbasis data yang akurat.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), angka melanjutkan, serta rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Regulasi tersebut telah mengatur strategi pelaksanaan, seperti penguatan *database* anak yang tidak terdaftar dalam sistem pendidikan yang terdapat pada lintas sektor, pemberian beasiswa pendidikan, pembentukan satuan tugas percepatan RLS, dan program “Lima Warga Satu Guru” (Mawar Sagu). Regulasi tersebut mengamanatkan kepada setiap pemerintah desa untuk melakukan penguatan dan pemanfaatan *database* ATS serta optimalisasi dana desa dan APBDes untuk memaksimalkan program pendidikan untuk masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat dan sektor swasta juga dilibatkan dalam upaya peningkatan IPM di Kabupaten Bogor. Program “Mawar Sagu” seperti yang disebutkan dalam regulasi tersebut merupakan upaya terobosan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk percepatan penanganan anak tidak sekolah dengan mengharuskan setiap satu orang

guru mengajak lima anak atau warga yang berstatus ATS untuk kembali mendapatkan pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Sasaran dari program akselerasi peningkatan IPM Bidang Pendidikan ini adalah masyarakat usia 6-60 tahun yang belum pernah tercatat d atau sudah tidak tercatat lagi dalam sistem pendidikan yang tersebar di 40 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bogor. Untuk menguatkan program Mawar Sagu, dilakukan penguatan dan pelatihan bagi pelopor pendidikan yang akan mendampingi tutor atau guru. Selain itu, lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga diarahkan untuk mengoptimalkan perannya dalam menampung dan memfasilitasi anak-anak dan warga yang belum menyelesaikan pendidikannya.

Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang luas dan karakteristik geografis dan demografis yang bervariasi, mulai dari wilayah perkotaan, perdesaan, pegunungan, serta pelosok-pelosok terpencil yang sulit dijangkau, sehingga menghadapi tantangan dan kesulitan dalam upaya menjangkau dan memberikan layanan pendidikan yang dapat menyentuh seluruh masyarakat, termasuk dalam penanganan ATS. Indikasi belum optimalnya implementasi penanganan ATS dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan. Meskipun setiap tahun terus meningkat dan sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 minimal 20% dari APBD, namun belum memberikan hasil signifikan pada penurunan angka ATS yang berujung pada peningkatan RLS dan HLS Kabupaten Bogor. Anggaran pendidikan tersebut lebih banyak terkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat administratif, seperti belanja pegawai dan operasional sekolah, sehingga upaya-upaya untuk menyentuh hal-hal yang lebih substantif dan strategis, seperti peningkatan akses, partisipasi, dan kualitas pendidikan belum membuahkan hasil yang maksimal (Lugina, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara besaran alokasi anggaran dan efektivitas pemanfaatannya dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Secara akademis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif efisiensi belanja publik dalam sektor pendidikan, di mana peningkatan anggaran tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan output pendidikan apabila

komposisi belanja lebih dominan pada aspek administratif dibandingkan intervensi langsung kepada kelompok sasaran (World Bank, 2020; OECD, 2019). Dengan kata lain, masalah utama bukan hanya pada “berapa besar” anggaran, tetapi “bagaimana” anggaran tersebut didistribusikan dan dimanfaatkan secara strategis.

Dalam konteks Kabupaten Bogor, heterogenitas wilayah memperkuat argumen bahwa pendekatan kebijakan pendidikan tidak dapat bersifat seragam. Wilayah dengan karakteristik geografis sulit, tingkat kemiskinan relatif tinggi, serta keterbatasan infrastruktur cenderung memiliki angka ATS yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik difokuskan pada Kecamatan Rumpin sebagai *locus* kajian.

Pemilihan Kecamatan Rumpin didasarkan pada beberapa alasan akademis dan empiris. Pertama, secara geografis, Rumpin merupakan wilayah yang memiliki kombinasi karakter perdesaan dan semi-terpencil dengan akses transportasi dan infrastruktur pendidikan yang belum merata, sehingga relevan untuk mengkaji persoalan akses pendidikan. Kedua, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor dan Dinas Pendidikan setempat (2022–2024), Kecamatan Rumpin termasuk dalam wilayah dengan jumlah ATS yang relatif tinggi dibandingkan beberapa kecamatan lain, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Ketiga, indikator pembangunan pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di wilayah barat Kabupaten Bogor, termasuk Rumpin, masih berada di bawah rata-rata kabupaten, yang menunjukkan adanya ketimpangan capaian pendidikan antarwilayah.

Selain itu, data menunjukkan bahwa sebagian desa di Kecamatan Rumpin memiliki tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang cukup signifikan, yang secara teoritis berkorelasi dengan tingginya risiko putus sekolah (UNESCO, 2021). Faktor ekonomi keluarga, kebutuhan bekerja pada usia sekolah, serta rendahnya kesadaran pendidikan menjadi determinan penting yang memperkuat keberadaan ATS di wilayah ini. Dengan mempertimbangkan aspek geografis, sosial-ekonomi, serta capaian indikator pendidikan tersebut, Kecamatan Rumpin menjadi representasi yang tepat untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana

kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Bogor diimplementasikan di tingkat lokal, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menangani permasalahan ATS.

Berdasarkan gambaran tersebut, implementasi penanganan ATS di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor menunjukkan masih terdapat tantangan. Perlu adanya upaya yang sistematis dan terarah untuk memperkuat implementasi tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk merumuskan strategi dalam implementasi kebijakan penanganan ATS di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Strategi implementasi yang tepat sangat dibutuhkan karena persoalan ATS bersifat multidimensi dan melibatkan banyak pihak. Dengan begitu, kebijakan dan program yang diarahkan untuk penanganan persoalan ATS dapat lebih sistematis, adaptif, terarah, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kabupaten Bogor memiliki jumlah ATS terbanyak di Provinsi Jawa Barat.
2. Capaian RLS dan HLS Kabupaten Bogor masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional.
3. Kondisi demografis dan geografis di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yang bervariasi menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi penanganan ATS.
4. Regulasi dan program yang ditujukan untuk penanganan ATS belum optimal, sehingga belum mampu menurunkan angka ATS secara maksimal.
5. Koordinasi lintas sektor belum berjalan efektif, terutama dalam hal pendataan dan verifikasi data ATS.

C. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengapa implementasi kebijakan penanganan ATS di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor belum optimal ?

2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan dalam upaya penanganan ATS di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan penanganan ATS di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
2. Mengembangkan strategi implementasi kebijakan yang tepat dalam upaya penanganan ATS di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting baik secara akademis maupun praktis.

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teoretis dan literatur empiris terutama implementasi kebijakan dan pengembangan strategi implementasi kebijakan penanganan ATS.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penanganan ATS di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam mengembangkan strategi implementasi kebijakan penanganan ATS yang sifatnya kontekstual sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap strategi implementasi kebijakan yang tepat dalam upaya penanganan ATS di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, disimpulkan beberapa hal di bawah ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yang bersifat struktural, implementatif, dan lingkungan eksternal. Namun demikian, faktor yang paling dominan terletak pada lemahnya kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi (*ability of the statute to structure implementation*). Kondisi tersebut tercermin dari belum jelasnya penerjemahan tujuan kebijakan ke dalam strategi operasional yang seragam, lemahnya koordinasi dan integrasi antarinstansi pelaksana, keterbatasan sumber daya pendukung, kurang adaptifnya aturan pelaksana terhadap karakteristik lokal, serta belum optimalnya pelibatan aktor nonpemerintah dalam penanganan ATS. Akibatnya, berbagai program yang dijalankan cenderung bersifat parsial, sektoral, dan belum mampu menyelesaikan akar permasalahan ATS secara komprehensif. Implementasi kebijakan juga dihadapkan pada karakteristik masalah ATS yang memiliki tingkat keterkendalian rendah, seperti tingginya angka kemiskinan, pekerja anak, pernikahan dini, rendahnya pendidikan orang tua, serta heterogenitas kondisi kelompok sasaran. Faktor-faktor tersebut semakin diperkuat oleh lingkungan eksternal yang kurang kondusif, terutama tekanan ekonomi keluarga yang mendorong anak untuk bekerja dan rendahnya orientasi sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal. Dengan demikian, belum optimalnya implementasi kebijakan ATS di Kecamatan Rumpin bukan

disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi antara kompleksitas masalah ATS, kelemahan struktur implementasi kebijakan, dan pengaruh lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perbaikan implementasi perlu difokuskan pada penguatan desain kebijakan melalui kejelasan tujuan, peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas dan sumber daya implementor, serta pengembangan pendekatan yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat sehingga upaya penanganan ATS dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif *Backward Mapping* Richard F. Elmore, langkah pertama yang paling fundamental adalah melakukan reposisi titik implementasi kebijakan. Selama ini, kebijakan ATS beroperasi dalam kerangka institusional berpusat pada dinas, sekolah, dan program-program formal. Padahal, dalam kenyataannya, keputusan untuk bersekolah atau tidak sepenuhnya ditentukan di tingkat rumah tangga. *Kedua*, strategi implementasi juga harus menyentuh struktur layanan pendidikan itu sendiri, yang selama ini cenderung kaku dan tidak adaptif. Sistem pendidikan formal dirancang dengan asumsi linearitas, anak masuk, mengikuti proses, lalu lulus. Namun, anak-anak ATS justru berada di luar jalur tersebut. Mereka membutuhkan pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi layanan pendidikan yang mampu menjangkau mereka yang telah terputus dari sistem formal, baik melalui model pembelajaran fleksibel, pendidikan berbasis komunitas, maupun integrasi antara pendidikan dan keterampilan kerja. *Ketiga*, strategi implementasi harus diarahkan pada penguatan aktor lapangan, tidak hanya melalui peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga melalui pemberian ruang diskresi yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan kondisi lokal. Tanpa kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas, implementor hanya akan menjadi perpanjangan tangan birokrasi yang kaku dan tidak responsif. *Keempat*, strategi penanganan ATS juga harus berani menyentuh akar

struktural dari permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi lokal. Selama terdapat struktur ekonomi yang secara aktif menyerap tenaga kerja anak, maka kebijakan pendidikan akan selalu berada dalam posisi defensif. Oleh karena itu, intervensi tidak bisa berhenti pada sektor pendidikan semata, tetapi harus masuk ke ranah regulasi dan pemberdayaan ekonomi.

B. Saran

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi implementasi kebijakan yang tepat dalam upaya penanganan ATS di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor agar mencapai hasil optimal, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu membentuk mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat permanen dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, PKBM, serta unsur masyarakat. Forum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga memiliki sistem berbagi data ATS yang terintegrasi sehingga setiap instansi memiliki basis data yang sama dan dapat melakukan intervensi secara terpadu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyusun pedoman operasional penanganan ATS yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal Kecamatan Rumpin, mengingat karakteristik wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, pekerja anak, dan rendahnya akses pendidikan. Pedoman tersebut harus memuat pembagian tugas yang jelas, prosedur penjangkauan ATS, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur.
2. Dinas Pendidikan perlu mengembangkan model layanan pendidikan yang lebih fleksibel bagi ATS, seperti kelas transisi, pembelajaran berbasis komunitas, program kejar paket yang terintegrasi dengan pelatihan keterampilan, serta sistem pembelajaran yang memungkinkan anak tetap belajar meskipun bekerja atau memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, pendataan ATS perlu dilakukan secara berkala hingga tingkat RT/RW dengan melibatkan sekolah, desa, kader masyarakat, dan pendamping lapangan sehingga data ATS selalu

diperbarui dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

3. Pemerintah desa perlu mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung program pencegahan dan penanganan ATS, seperti bantuan perlengkapan sekolah, program pendampingan keluarga rentan, serta kegiatan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan. Pemerintah desa juga perlu membentuk tim relawan atau kader pendidikan desa yang bertugas melakukan penjangkauan langsung kepada anak yang berisiko putus sekolah maupun yang sudah tidak bersekolah untuk memastikan mereka kembali memperoleh layanan pendidikan yang sesuai.
4. Pendamping ATS, guru, pengelola PKBM, dan aparat desa perlu diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyesuaikan strategi penanganan dengan kondisi lapangan. Penguatan kapasitas implementor tidak hanya melalui pelatihan teknis, tetapi juga melalui pengembangan kemampuan mediasi sosial, pendampingan keluarga, dan pemetaan masalah sosial-ekonomi masyarakat.
5. Penanganan ATS tidak cukup dilakukan melalui pendekatan pendidikan semata, tetapi harus diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memprioritaskan keluarga ATS sebagai sasaran program bantuan sosial, pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, maupun program peningkatan pendapatan keluarga sehingga tekanan ekonomi yang mendorong anak bekerja dapat dikurangi.
6. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan anak memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan, termasuk pengaruh budaya lokal, kondisi pasar kerja informal, dan strategi bertahan hidup keluarga miskin. Selain itu, penelitian dapat menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan ATS dan keluarganya secara langsung agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan dan hambatan yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Anggriani. (2013). Teori-teori Administrasi Publik dalam Konteks Kekinian. *Proceedings International Conference on Islam, Politics, Laws and Social Sciences*. Alauddin State Islamic University (UIN) Makassar, 14 Januari 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2022). *Kecamatan Rumpin dalam Angka 2022*. Bogor: BPS Kabupaten Bogor.
https://bogorkab.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/735e5c661b527c721b6a31a7/kecamatan-rumpin-dalam-angka-2022.html?utm_source=chatgpt.com
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2023). *Kecamatan Rumpin dalam Angka 2023*. Bogor: BPS Kabupaten Bogor.
https://bogorkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/0b095540d81d6802243e07c3/kecamatan-rumpin-dalam-angka-2023.html?utm_source=chatgpt.com
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024). *Kecamatan Rumpin dalam Angka 2024*. Bogor: BPS Kabupaten Bogor.
https://bogorkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/51b4e2c80d661f7676c12853/kecamatan-rumpin-dalam-angka-2024.html?utm_source=chatgpt.com
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). Dashboard Statistik. Diakses tanggal 18 September 2025.
- Baihakqi dan Rahaju. (2025). Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Bertajuk “Ayo Sekolah Rek” di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol: 02, No. 12, Juni 2025.
<https://doi.org/10.5281zenodo.15613605>.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. (2022–2024). *Laporan Data Pendidikan dan Anak Tidak Sekolah (ATS)*. Bogor: Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

- Elmore, Richard. (1979). *Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions*, *Political Science Quarterly*, Vol. 94, No. 4. <https://www.psqonline.org/article.cfm?IDArticle=10628> .
- Fauzan, M.R. (2024). Pemkab Bogor Akui Belum Ada Juknis Jelas Terkait Program Mawar Sagu, Pengamat Minta 4 Poin Harus Ada. Artikel dalam <https://radarbogor.jawapos.com/pendidikan/2475064434/pemkab-bogor-akui-belum-ada-juknis-jelas-terkait-program-mawar-sagu-pengamat-minta-4-poin-harus-ada>. Diakses tanggal 18 September 2025.
- Hanifa, Maula. (2024). Fenomena Pernikahan Usia Dini dan Dampak terhadap Keluarga di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 175-179. <https://doi.org/10.62017/arima.v1i3.708>.
- Hakim, L., Izzatusholekha, Dewi, M.P., Rudiatin, E. (2025). Implementasi Kebijakan Gerakan Kembali Bersekolah: Analisis Model Grindle dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Brebes. *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*. Vol: 7, No. 2. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1208>.
- Huda, G.R.N., Hermawan, R., dan Danar, O.R. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol: 6, No. 6 (2023).
- Hidayanti. (2023). Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, Vol. 12 (3), Edisi September 2023: 52-65.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis (Edisi 2)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jaya, Immanuel. (2021). Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer). *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 3(1), pp. 1–16. doi: 10.37304/jispar.v3i1.371.

- Karmanis, & Karjono. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- Kemendikbudristek dan UNICEF. (2024). Studi Pendidikan Non-Formal sebagai Jalur Pembelajaran Alternatif bagi Anak Tidak Sekolah di Indonesia, termasuk dalam Konteks Pandemi COVID-19. UNICEF: Jakarta. Juml.
- Lugina, Sammy. (2025). Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Dimensi Pendidikan di Kabupaten Bogor. *Tesis Magister Terapan Administrasi Publik*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Lipsky, Michael. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services* (New York: Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, Daniel A., dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL. Scott, Foresman.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy (Edisi 6)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>
- Pusdatin Kemendikdasmen (2025). Tabel Data ATS - Drop Out Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
<https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/index.php/IndividuSekolah/Rangku/man/000000>. Diakses tanggal 17 September 2025.
- Pierson, Paul, (2000) "Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics," *American Political Science Review* 94, no. 2. 251–267.
<https://www.jstor.org/stable/2586011>.
- Peters, B. Guy, (2018) *The Politics of Bureaucracy*. New York. Routledge.
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Sidoarjo. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-036-6>.
- Ramadhan, R.A. (2022). Fenomena Bonge & ABG Citayam, Ada 1.884 Siswa di Kabupaten Bogor Putus Sekolah. Artikel dalam

<https://kumparan.com/kumparannews/fenomena-bonge-and-abg-citayam-ada-1-884-siswa-di-kabupaten-bogor-putus-sekolah-1yYXOk92lqt/full>.

Diakses tanggal 18 September 2025.

Saniyya, F., & Manar, D. G. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan “Mayo Sekolah” Sebagai Upaya Menekan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 665-679. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/48874>.

Sakti dan Rahaju. (2025). Implementasi Program *Outreach* Penanganan Anak Tidak Sekolah melalui Pendidikan Kesetaraan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol: 7, No: 2, Tahun 2023. ISSN 2654-4881 e-ISSN 2722-4457.

Sabatier, Paul A. (2008) “Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research,” *Journal of Public Policy* 6, no. 1. 25–30. <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-public-policy/article/abs/topdown-and-bottomup-approaches-to-implementation-research-a-critical-analysis-and-suggested-synthesis/2100355E461CC28D75C42AF64A4083D9>.

Syahrudin. (2021). *Seri Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Nusamedia.

UNESCO. (2023). *250 million children out-of-school: What you need to know about UNESCO's latest education data*. Dalam <https://www.unesco.org/en/articles/250-million-children-out-school-what-you-need-know-about-unescos-latest-education-data>. Diakses 2 Juni 2025.

World Bank. (2020). *The State of Global Learning Poverty: 2020 Update*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1552-2>.

Yandwiputra, A.R. (2018). Kampung Putus Sekolah di Bogor, Tak Ada yang Punya Ijazah SD. Artikel dalam <https://www.tempo.co/arsip/kampung-putus->

[sekolah-di-bogor-tak-ada-yang-punya-ijazah-sd-925855](#). Diakses tanggal 18 September 2025.

Yuliwati. (2022). Wajib Belajar 12 Tahun dalam Realita di Wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 10(2), 2022, 110-118.

Yudha, H.P. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*. Vol: 1, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2641>.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan